

AL-Qalam

VOLUME 26 NOMOR 2 NOVEMBER 2020

**MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN
MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT
PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH**
Sabara

**AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
BAGI NON MUSLIM: STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN
DAN MODEL PEMBELAJARAN
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO**
Hadi Pajarianto dan Muhaemin

**SIKAP DAN PERILAKU BERAGAMA
ALUMNI PONDOK PESANTREN MADRASAH
WATHONIYAH ISLAMİYAH (PPMWI)
KEBARONGAN BANYUMAS**
Supriyanto dan Hendri Purbo Waseso

**DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM
QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH**
Ismail dan Bastiar

**PEMBELAJARAN JARAK JAUH
SEBAGAI HABITUS BARU DALAM EKOSISTEM
PENDIDIKAN DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**
Muhammad Rais

**DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT
PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI
DI MUARA TAMI JAYAPURA**
Muh. Irfan Syuhudi

**POTRET ORGANISASI TAREKAT
DAN DINAMIKANYA DI SULAWESI BARAT**
Mukhlis Latif dan Muh. Ilham Usman

**AWA ITABA LA AWAI ASSANGOATTA:
APLIKASI MODERASI BERAGAMA
DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL TO WOTU**
Muhammad Sadli Mustafa

**THE BIOGRAPHY
OF PUANG MASSER AND HIS PAPERS**
Idham

**RELASI TAUHID DAN POLITIK
PADA MASYARAKAT BONE**
Abul Khair, A. Qadir Gassing, HT., Usman Jafar, dan Andi Aderus

**KOMPARASI MODERASI KEBERAGAMAAN
MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO
DAN IAIN PALU**
Nurhayati dan Suhardin

**TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI:
PECAH KONGSI NU-MASYUMI
JELANG PEMILU 1955**
Idwar Anwar

**MENJAHIT BENANG MERAH
NARASI SEJARAH ISLAM DOMPU**
Ni Putu Eka Juliawati, Abu Muslim, Luh Suwita Utami

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM
RITUAL MADDOJA BINE
PADA KOMUNITAS MASYARAKAT BUGIS
DI SULAWESI SELATAN**
Sarifa Suhra dan Rosita

**STRATEGI DI KOMUNITAS BARU:
KECERDASAN BUDAYA KIAI MOJO
MENDIRIKAN KAMPUNG JAWA TONDANO**
Kamajaya Al-Katuuk

**ANREGURUTTA HM. YUNUS MARTAN:
SOSOK PANRITA PEMBAHARU**
Husnul Fahimah Ilyas



**KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

Jurnal
AL-Qalam

VOLUME 26

NOMOR 2

Halaman
221 - 424

Makassar
November 2020

ISSN
0854 - 1221

E-ISSN
2443 - 2288

TERAKREDITASI - SINTA 2
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset,
dan Pengembangan Kemenristek Dikti RI
Nomor 10/E/KPT/2019 Tanggal 4 April 2019

AL-Qalam

Volume 26 Nomor 2 November 2020

PERINGKAT AKREDITASI SINTA 2

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset,
dan Pengembangan Kemenristek Dikti RI
Nomor 10/E/KPT/2019 Tanggal 4 April 2019
Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2019



BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA
MAKASSAR
2020

AL-Qalam

Volume 26 Nomor 2 November 2020

Jurnal Al-Qalam adalah jurnal yang diterbitkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dengan tujuan menyebarluaskan informasi tentang perkembangan ilmiah keagamaan di Indonesia, khususnya Kawasan Timur Indonesia, meliputi; Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berasal dari hasil penelitian dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh Peneliti, Akademisi, maupun Pemerhati keagamaan. Terbit pertama kali tahun 1990 dengan frekuensi dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan November.

Penanggung Jawab:

Dr. H. Saprillah, S. Ag., M.Si.

Redaktur Ahli:

Prof. Dr. H. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

Pemimpin Redaksi:

Prof. Dr. H. Idham, M.Pd.

Sekretaris Redaksi:

Abu Muslim, SH.I., MH.I.

Anggota/Editor:

Dr. Muhammad Rais, M.Si.

Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si.

Husnul Fahimah Ilyas, S.Pd., MA.Hum.

Baso Marannu, S.Pd., MM.

Muh. Irfan Syuhudi, S.Sos., M.Si.

Muh. Subair, SS, MA.

Asnandar Abubakar, ST.

Sitti Arafah, S.Ag., M.Pd.

Dra. Hj. Nelly, MM.

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Mudjahirin Thohir, MA.

(UNDIP Semarang).

Prof. Dr. H. Imam Tholhah, MA.

(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).

Prof. Dr. H. Koeswinarno

(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).

Prof. Dr. H. Marzani Anwar

(Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. Waseno

(Universitas Negeri Semarang)

Prof. Dr. Dwi Purwoko
(LIPI).
Prof. Dr. Oman Fathurahman
(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Nurman Said, Ph.D, MA
(UIN Alauddin Makassar).
Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Ph.D.
(Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).
Dr. Hj. Ulfiani Rahman, Ph.D.
(UIN Alauddin Makassar).
Wahyuuddin Halim, MA., Ph.D.
(UIN Alauddin Makassar)
Dr. Muhaimin, M.Th.I.
(UIN Alauddin Makassar)
Dr. Muhammad Yaumi, M. Ag.
(UIN Alauddin Makassar)

Kesekretariatan/Administrasi:

Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Amir Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S.Sos.
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Amru Ichwan Alwy, S.IPI.
Azruhyati Alwy, SS.
Nasri, S.Sos.
Zakiyah, SE

Lay Out & Cover Desain:

Fauzan Ariwibowo, SH.

Redaksi Jurnal Al-Qalam: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Alamat: Jl. AP. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon/Fax: (0411) 452952 – (0411) 452982
Email: alqalamjurnal@gmail.com
Website: <http://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam>

1. MEMBANGUN SEMANGAT KEBANGSAAN MELALUI AGAMA PADA MASYARAKAT PERBATASAN DI SEBATIK TENGAH	
Sabara.....	221-236
2. AL-ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN BAGI NON MUSLIM: STUDI EMPIRIK KEBIJAKAN DAN MODEL PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO	
Hadi Pajarianto dan Muhaemin.....	237-244
3. SIKAP DAN PERILAKU BERAGAMA ALUMNI PONDOK PESANTREN MADRASAH WATHONIYAH ISLAMİYAH (PPMWI) KEBARONGAN BANYUMAS	
Supriyanto dan Hendri Purbo Waseso.....	245-254
4. DINAMIKA KALENDER HIJRIAH DALAM QANUN SYARIAT ISLAM PROVINSI ACEH	
Ismail dan Bastiar.....	255-266
5. PEMBELAJARAN JARAK JAUH SEBAGAI HABITUS BARU DALAM EKOSISTEM PENDIDIKAN DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR	
Muhammad Rais.....	267-280
6. DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI DI MUARA TAMI JAYAPURA	
Muh. Irfan Syuhudi.....	281-294
7. POTRET ORGANISASI TAREKAT DAN DINAMIKANYA DI SULAWESI BARAT	
Mukhlis Latif dan Muh. Ilham Usman.....	295-306
8. AWA ITABA LA AWAI ASSANGOATTA: APLIKASI MODERASI BERAGAMA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL TO WOTU	
Muhammad Sadli Mustafa.....	307-318
9. THE BIOGRAPHY OF PUANG MASSER AND HIS PAPERS	
Idham.....	319-326
10. RELASI TAUHID DAN POLITIK PADA MASYARAKAT BONE	
Abul Khair, A. Qadir Gassing, HT., Usman Jafar, dan Andi Aderus.....	327-338
11. KOMPARASI MODERASI KEBERAGAMAAN MAHASISWA UNIVERSITAS TADULAKO DAN IAIN PALU	
Nurhayati dan Suhardin.....	339-352
12. TULANG PUNGGUNG DIPUNGGUNGI: PECAH KONGSI NU-MASYUMI JELANG PEMILU 1955	
Idwar Anwar.....	353-368
13. MENJAHIT BENANG MERAH NARASI SEJARAH ISLAM DOMPU	
Ni Putu Eka Juliawati, Abu Muslim, Luh Suwita Utami.....	369-386
14. NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM RITUAL MADDOJA BINE PADA KOMUNITAS MASYARAKAT BUGIS DI SULAWESI SELATAN	
Sarifa Suhra dan Rosita.....	387-400
15. STRATEGI DI KOMUNITAS BARU: KECERDASAN BUDAYA KIAI MOJO MENDIRIKAN KAMPUNG JAWA TONDANO	
Kamajaya Al-Katuuk.....	401-410
16. ANREGURUTTA HM. YUNUS MARTAN: SOSOK PANRITA PEMBAHARU	
Husnul Fahimah Ilyas.....	411-424

AL-Qalam

Volume 26 Nomor 2 November 2020

ISSN 0854-1221 / E-ISSN 2443-2288

PENGANTAR REDAKSI

Salam Kebajikan,

Puji Syukur Kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Volume 26 Nomor 2 Tahun 2020 akhirnya kembali hadir di tengah-tengah para Pembaca Jurnal Al-Qalam yang budiman. Kehadiran 16 tulisan ini tentunya telah menjadi bagian dari komitmen kami untuk senantiasa menghadirkan tulisan-tulisan bermutu dengan senantiasa memerhatikan kedalaman substansial dalam kaitannya dengan topik-topik keberagaman yang kontekstual dan peka zaman.

Meski Bangsa Indonesia di tahun 2020 ini masih dalam suasana Covid-19, namun bukan berarti hal tersebut menjadi halangan anak bangsa untuk menghasilkan karya-karya terbaru dan terbaiknya untuk mengisi tatanan kehidupan baru sebagai bagian dari nutrisi keilmuan, yang dalam konteks yang lebih luas dapat menjadi bagian dari penambah imunitas keilmuan kita semua.

Segmen yang kami hadirkan semoga dapat menjadi referensi ilmiah pada tahun pandemi ini. Kami juga menyadari bahwa dalam setiap sistem korespondensi dan proses sirkulasi Jurnal Al-Qalam Volume 26 Nomor 2 ini, tentu di sana-sini masih terdapat kekurangan, tapi kami mengedepankan prinsip pengabdian tanpa batas berbasis Ikhlas Beramal, Alhamdulillah semua tantangan dapat dilewati.

Ada ragam penyesuaian yang akhirnya dijalankan demi terbitnya edisi ini, tentu dengan senantiasa menjalankan dan mematuhi seluruh aspek protokol Covid-19. Olehnya itu, kami berharap bahwa tulisan yang kami sajikan ini bisa diterima dengan baik dan dapat turut andil dalam menambah khazanah keilmuan kita semua, khususnya di bidang kajian keagamaan.

Semoga Persembahan Tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Rahayu Rahayu Rahayu.

Selamat membaca!

Makassar, 1 November 2020

Pemimpin Redaksi

**DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT
PERBATASAN INDONESIA-PAPUA NUGINI DI MUARA TAMI JAYAPURA**

***THE NATIONALITY DYNAMICS OF SOCIETY
INDONESIAN-PAPUA NUGINI BORDER COMMUNITY IN MUARA TAMI
JAYAPURA***

Muh. Irfan Syuhudi

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Alamat: A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Email: irfansyuhudi@gmail.com

Naskah diterima 25 Juli 2020, Naskah direvisi 15 September 2020, Naskah disetujui 4 Oktober 2020

Abstrak

Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Muara Tami dan mendeskripsikan dinamika paham kebangsaan mereka. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Temuan penelitian ini adalah, sebagai berikut: *Pertama*, infrastruktur di Muara Tami mengalami kemajuan dibanding lima tahun lalu. Akses pelayanan publik telah tersedia, meski masih dalam keterbatasan. Kondisi perekonomian masyarakat perbatasan sejak program transmigrasi dibuka pada 1984, umumnya sejahtera. Infrastruktur juga cukup bagus dibanding lima tahun lalu. Secara ekonomi, masyarakat Indonesia di perbatasan lebih sejahtera dibanding orang Papua Nugini (PNG). Ini pula yang menyebabkan perasaan bangga menjadi bagian dari Negara Indonesia. *Kedua*, paham kebangsaan masyarakat perbatasan secara umum terlihat cukup bagus, apabila mengacu kepada pengetahuan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan kebinekaan. Meski begitu, ingatan sosial sebagian Orang Asli Papua (OAP) terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM), masih bertumbuh di kalangan aktivis mahasiswa dan dosen OAP. Adanya kesenjangan ekonomi antara migran pendatang non Papua dengan OAP, sering memicu kecemburuan OAP, yang sewaktu-waktu dapat berdampak kepada ketegangan sosial. Karena itu, nasionalisme bagi OAP, juga adalah menyangkut peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Kata Kunci: nasionalisme orang papua, masyarakat perbatasan, dinamika kebangsaan

Abstract

This paper aims to describe the social conditions of the people at the Indonesia-Papua Nugini border, in Muara Tami, Jayapura, and describe their national understanding. Data collection methods through interviews, observation, and literature study. The findings of this study are as follows: First, the infrastructure in Muara Tami has made progress compared to five years ago. Access to public services is available, although it is still limited. The economic conditions of the border communities since the transmigration program opened in 1984, are generally prosperous. Infrastructure is also quite good compared to five years ago. Economically, the Indonesian people on the border are more prosperous than the people of Papua New Guinea (PNG). This also causes a feeling of pride in being part of the Indonesian State. Second, the understanding of the nationality of border communities in general looks quite good, when referring to knowledge of Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary Republic of Indonesia, and diversity. Even so, the social memory of some Indigenous Papuans (OAP) of the Free Papua Organization (OPM) is still growing among student activists and lecturers of OAP. The existence of economic disparities between non-Papuan migrants and OAP, often triggers OAP jealousy, which at times can have an impact on social tensions. Therefore, nationalism for OAP is also about increasing economic welfare.

Keywords: papua's nationalism, border community, nationality dynamics

PENDAHULUAN

Membicarakan masalah nasionalisme di Papua seperti tak pernah ada selesainya. Dalam artian, masih ada sebagian kalangan yang meragukan jiwa nasionalisme orang asli Papua (OAP) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, dalam catatan sejarah Indonesia, Papua resmi masuk ke dalam pangkuan bumi pertiwi sejak dihelatnya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada Agustus 1969.

Konflik yang muncul di Papua sering dikaitkan dengan persoalan adanya perasaan ketidakpuasan dan ketidakadilan OAP terhadap pemerintah Indonesia. Sikap ini lantas memunculkan beragam tanggapan, yang diasumsikan pada keinginan mereka untuk melepaskan diri dari NKRI. Mengenai konflik di Papua, Muridan S. Widjojo (2009), peneliti LIPI, misalkan, menyebutkan, empat persoalan dasar yang menyebabkan lahirnya konflik di Papua. Persoalan dasar tersebut adalah; 1) marginalisasi penduduk asli Papua; 2) kegagalan pembangunan; 3) pelanggaran HAM dan kekerasan militer, dan 4) proses integrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah (Widjojo, 2009).

Pandangan Widjojo mirip dengan Richard Chauvel (2005), yang mengemukakan konflik di Papua disebabkan oleh persoalan mendasar, seperti 1) kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia; 2) adanya persaingan yang dirasakan elite Papua dengan pejabat asal luar Papua yang mendominasi pemerintahan sejak Kolonial Belanda; 3) pembangunan ekonomi dan pemerintah di Papua yang berbeda; dan 4) adanya marginalisasi OAP, karena kehadiran pendatang (Mambraku, 2015).

Dari berbagai penelitian yang fokus terhadap konflik Papua, hanya ada dua sumber pemicunya, yaitu masalah pelaksanaan Pepera, dan proses pembangunan di Papua. Yang pertama, terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah Indonesia dengan orang Papua menyangkut Pepera. Versi pemerintah Indonesia menyebutkan, Papua secara *de facto* dan *de jure* telah menjadi milik Indonesia berdasarkan hasil penentuan pelaksanaan Pepera, Agustus 1969, dan diperkuat lagi dengan keputusan resolusi PBB. Sengketa

antara Belanda dan Indonesia diselesaikan melalui *New York Agreement* pada Agustus 1962, dan proses persiapan pelaksanaan serah terima kekuasaan dilaksanakan oleh *The United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Sementara versi OAP, status politik tanah Papua sebagai bagian wilayah Indonesia tidak sah, karena proses resmi Pepera diwarnai oleh praktik intimidasi dan kekerasan, sedangkan proses *New York Agreement* dianggap tidak sesuai. Kedua, atau mengenai proses pembangunan di Papua disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap proses pembangunan. Menurut pemerintah, proses pembangunan telah menjejahterakan, mencerdaskan, dan memberdayakan orang Papua, sedangkan versi Papua justru sebaliknya. Di samping itu, orang Papua memandang telah terjadi kekerasan politik dan pelanggaran HAM, eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial ekonomi, migrasi tenaga kerja dari luar Papua, serta marginalisasi OAP (Mambraku, 2015).

Penelitian menyangkut masyarakat yang tinggal di perbatasan negara, selalu menarik minat penelitian. Kebanyakan penelitian merasa “penasaran” seperti apa nasionalisme masyarakat di perbatasan. Selain itu, tentunya, apa fasilitas dan akses layanan publik yang diperoleh masyarakat di sana. Sejumlah penelitian tentang masyarakat perbatasan Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste, menyebutkan, persoalan relasi antara nasionalisme dan kondisi ekonomi masyarakat perbatasan adalah yang paling banyak diulas kalangan peneliti. Yang menggembirakan, penelitian tersebut menemukan keseragaman tentang masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan negara, bahwa mereka semua tetap bangga menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah keterbatasan infrastruktur dan ekonomi (Pamungkas, 2015).

Pada wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini (PNG), di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, seperti konteks penelitian ini, berkembang juga asumsi yang meragukan nasionalisme OAP di wilayah perbatasan. Fasilitas yang belum memadai, marginalisasi ekonomi, serta akses yang jauh,

menjadi salah satu penyebab OAP “memalingkan muka” dari Indonesia.

Barangkali, asumsi tersebut bisa dikatakan benar bila mengamati kondisi masyarakat perbatasan, beberapa tahun silam. Akan tetapi, dalam rentang lima tahun terakhir, sejak pemerintahan Jokowi menggenjot melakukan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dan sebagainya) di Papua, termasuk salah satunya, membangun ulang tapal batas negara Indonesia – PNG menjadi megah dari negara PNG, tanggapan “miring” itu akhirnya menjadi terbalik. Yakni, sebagian besar OAP di perbatasan bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Identitas ke-Papua-an memang tidak bisa hilang dari diri mereka, karena ia sifatnya terberi (*given*). Namun, nasionalisme mereka terhadap pemerintahan saat ini, sama besarnya dengan nasionalisme ke-Papua-an mereka. Sama seperti etnis-etnis lain di Indonesia, perbedaan identitas suku satu dengan yang lain adalah primordial (Clifford Geertz, 1973). Hubungan primordial ini merupakan hubungan yang berakar sejak lahir hingga menjadi komunitas agama tertentu, berbahasa tertentu, dan mengikuti tradisi-tradisi sosial tertentu (Muslim, 2014)). Dalam suatu komunitas primordial, sering kali pula ada sentimen-sentimen terhadap etnis lain, sehingga pada peristiwa-peristiwa tertentu, tak bisa dihindari munculnya perasaan “lebih baik” dari suku lain. Namun, tentunya, perasaan ini tidak ada korelasinya dengan nasionalisme (Pamungkas, Cahyo & Triandriasara, 2018).

Artikel ini ingin mendeskripsikan kondisi sosial masyarakat perbatasan Indonesia-PNG yang bermukim di Distrik Muara Tami, serta menelusuri paham kebangsaan masyarakat Indonesia di wilayah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Nasionalisme (Di) Papua

Perkembangan sejarah Papua memang berbeda dengan daerah lain di nusantara. Politik identitas melekat pada sejarah Papua. Sejumlah tulisan menunjukkan, identitas ke-Papua-an terbentuk pada masa kolonial sebagai antitesis dari identitas ke-Indonesia-an. Konstruksi identitas terjadi ketika orang Papua merasa terancam oleh pendatang dari Indonesia yang bekerja pada birokrasi

kolonial, seperti guru, pendeta, tukang. Setelah Indonesia merdeka, identitas tersebut menguat kembali, terlebih ketika orang Papua mengalami marginalisasi ekonomi dan kekerasan politik.

Papua, atau wilayah yang letaknya paling ujung Timur, merupakan daerah yang paling terlambat merasakan atmosfer kemerdekaan di banding daerah lain di Indonesia. Pada saat daerah lain secara serentak merayakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Papua justru masih merasakan kekuasaan Belanda hingga 1962. Ini pula yang menyebabkan, perkembangan nasionalisme Indonesia di Papua berbeda corak (Meteray, 2012).

Pemahaman nasionalisme yang dirasakan orang Papua berbeda dari daerah lain. Nasionalisme di Papua mirip dengan nasionalisme orang Minahasa. Tulisan David Henley (1996), cukup menarik menggambarkan perbedaan antara nasionalisme yang sifatnya nasional, dan nasionalisme “lokal”. Menurut Henley, Minahasa memang pada akhirnya bersedia menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hanya saja, pandangan orang Minahasa saat itu berbeda dengan konsep yang dipromosikan Soekarno, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang merupakan sesuatu yang asing bagi sebagian besar rakyat Minahasa, termasuk kaum intelektualnya.

Bagi masyarakat Minahasa, bangsa Indonesia adalah sesuatu yang abstrak, sementara negara Indonesia yang orang Minahasa harapkan adalah sebuah negara federal, yang memungkinkan setiap daerah memelihara otonomi politik dan budaya. Demikian pula yang dirasakan orang Papua, di mana mereka lebih dulu mengenal kesadaran tentang ke-Papua-an ketimbang ke-Indonesia-an. Karena itu, keinginan untuk menjadi Indonesia bagi masyarakat Papua tidak semudah yang dibayangkan (Meteray, 2012).

Sebelum nasionalisme tertanam pada masyarakat Papua, yang tampak menonjol dari mereka adalah kesadaran terhadap ke-Papua-an (Muslim, 2019). Sikap ini muncul disebabkan adanya persaingan antara orang Papua dengan etnis lain yang berada di Papua, seperti Ambon, Kei, Sangir, dan Manado, sebelum Perang Pasifik 1942 maupun selama 1944-1962. Kehadiran etnis lain sebagai guru

dan pendeta untuk memberi “pencerahan”, memantik lahirnya kesadaran ke-Papua-an. Parahnya, orang Ambon, Sangir, Kei, dan Tanimbar, yang ditugaskan oleh Belanda sebagai guru dan pendeta, memandang orang Papua melalui “kacamata” mereka. Karena tak sabar menghadapi orang-orang dan murid-murid Papua, guru dan pendeta ini kerap melontarkan kalimat “Papua bodoh”. Ungkapan bernada peyoratif inilah, yang membuat orang Papua merasakan ada perbedaan antara mereka dengan pendatang. Hal ini pula, yang pada akhirnya membuat mereka merasakan tidak dihargai oleh pendatang (Meteray, 2012).

Chauvel (2005), mengemukakan, akar persoalan yang menumbuhkan benih-benih kebencian orang Papua terhadap orang Indonesia adalah sistem pemerintahan *dual colonialism*, yang diperankan orang Belanda sebagai kelompok atas, dan kelompok bawah yang mencakup mayoritas orang Indonesia yang berada di Papua. Dalam berbagai konflik, orang Papua cenderung memusuhi orang Indonesia daripada orang Belanda. Dalam sistem *dual colonialism* yang diciptakan Belanda, lapisan bagian pertama diduduki orang Eropa yang umumnya pegawai pemerintah dan misionaris, sedangkan lapisan kedua ditempati orang Indonesia dan Tionghoa (guru, pegawai rendahan, dan pedagang). Sementara itu, orang Papua sendiri menempati lapisan sosial bagian ketiga, atau paling bawah (Meteray, 2012).

Adanya marginalisasi sosial dan ekonomi menyebabkan orang Papua resisten terhadap para pendatang. Sikap inilah yang salah satunya memunculkan nasionalisme ke-Papua-an mereka. Pada akhirnya, mereka menganggap, semua pendatang yang menetap di Papua, seperti orang Jawa, Ambon, Manado, dan sebagainya, adalah orang Indonesia, dan berbeda dengan mereka.

Proses pengindonesiaan di Tanah Papua dilakukan dengan cepat, dan dengan model “tak lazim”, seperti tanpa melalui pendidikan formal serta tanpa perencanaan matang. Kesadaran keindonesiaan di Papua tidak dimulai dari orang-orang Papua sendiri, melainkan melalui “pendatang”, seperti Soegoro Atmoprasodjo, Gerungan, Sam Ratulangi, Stefanus Joseph, dan Petero Jandi pada 1946-1948. Sejak 1945 hingga 1962,

Papua masih di bawah pemerintahan Belanda, dan sebagian besar masyarakat di daerah pegunungan tengah belum tersentuh gagasan-gagasan nasionalisme (Meteray, 2014).

Meteray mencatat, empat kelemahan yang melatari nasionalisme di Papua sejak 1945 hingga 1962. *Pertama*, proses yang berlangsung cepat, tidak terencana, tanpa proses pendidikan, hanya melalui imbauan dan pembentukan partai politik. *Kedua*, ketika tokoh penggagas Indonesia asal Indonesia ditangkap dan kemudian dikembalikan ke luar Papua, pengindonesiaan lebih banyak diperankan oleh orang Papua, dan orang Indonesia lain yang masih mendalami gagasan keindonesiaan. *Ketiga*, penggunaan bahasa Melayu sejak kehadiran gereja dan pemerintah di Papua belum mampu membangkitkan rasa nasionalisme di Papua. *Keempat*, proses gerakan pengindonesiaan orang Papua dilakukan melalui jalur bawah tanah, karena sejak 1945 hingga 1962 masih di bawah pemerintahan kolonial Belanda (Meteray, 2014). Meski terkesan lambat di banding daerah lain, proses pengindonesiaan di Papua tetap berjalan.

Pada dasarnya, nasionalisme tidak tumbuh dengan sendirinya. Ia ditanamkan melalui aparat-aparat ideologi negara dengan menggunakan ritual-ritual nasionalisme, serta dilakukan berulang-ulang dan diinstitusionalisasikan. Memperingati perayaan 17 Agustus, pembelajaran kebangsaan di sekolah-sekolah, dan seminar-seminar, misalnya, merupakan salah satu bentuk penanaman ideologi kebangsaan. Lembaga negara juga tetap gencar melakukan upaya sistematis dan terencana untuk mengajarkan empat pilar kebangsaan; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika, di sekolah-sekolah.

Dalam pandangan Gramsci, apa yang dilakukan negara adalah untuk menanamkan ideologinya terhadap masyarakat sipil. Secara sosiologis, praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai ritus-ritus nasionalisme untuk menggalang solidaritas suatu kelompok, menjaga integrasi sosial, sekaligus upaya penanaman pengetahuan masyarakat tentang Indonesia dalam konsepsi politik, yaitu NKRI dan simbol-simbolnya (Pamungkas, 2015).

Menanamkan wawasan kebangsaan sebagai upaya untuk memelihara rasa

kebangsaan, belum dianggap cukup hanya dengan melakukan doktrinasi terhadap empat pilar kebangsaan, seperti Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika. Menanamkan dan memelihara kebangsaan mesti juga disertai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Maka, benar apa yang dikatakan Ben Anderson, dalam bukunya, *Imagined Communities: Reflection on the Origin and Sphere of Nationalism* (1991), bahwa seringkali nasionalisme tidak menemukan relevansinya, dan gagal dimaknai oleh masyarakat yang membayangkannya ketika dihadapkan dalam konteks ekonomi, politik, sosial budaya. Bila semua hal tersebut belum terpenuhi, nasionalisme dipandang sebagai komunitas politik yang dibayangkan (Pamungkas, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang melihat OAP dan orang non Papua, yang bermukim di perbatasan Muara Tami (perbatasan Indonesia-PNG), sebagai subyek penelitian (Arikunto, 2002, pp. 121–122). Untuk mendalami nasionalisme di daerah perbatasan Indonesia-PNG, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumen (artikel, buku, dan tulisan jurnal). Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, yakni mereka yang memahami konteks penelitian ini (Kasniyah, 2012: 7).

Mereka yang dijadikan informan adalah pegawai di kementerian agama Jayapura, aktivis lokal, tokoh masyarakat, dan warga yang menetap di Muara Tami. Sementara itu, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data kemudian dianalisis. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, memaparkan data, dan simpulan (Endraswara, 2006, p. 176).

PEMBAHASAN

Geografis, Demografis, dan Sosial Kemasyarakatan

Muara Tami diambil dari nama sebuah kali (sungai), yang mengalir dan mengelilingi wilayah ini. Tami kemudian diabadikan menjadi nama distrik, yang diidentikkan dengan wilayah perbatasan di Jayapura. Ini disebabkan, lokasi Indonesia dengan negara

Papua Nugini (PNG) masuk wilayah kawasan ini. Meski begitu, secara geografis, distrik yang berdekatan dengan tapal batas negara Indonesia - PNG adalah Kampung Mosso.

Merujuk pada data BPS Jayapura 2017 (BPS Kota Jayapura, 2017), ada dua kelurahan dan enam kampung di Distrik Muara Tami. Dari delapan kelurahan/kampung tersebut, Kampung Skouw Mabo ditunjuk sebagai Ibukota Distrik. Sementara itu, Kelurahan dan Kampung di Muara Tami adalah Koya Barat, Koya Timur, Skow Mabo, Skow Yambe, Skow Sae, Holtekam, Koya Tengah, dan Mosso. Berdasarkan jumlah penduduk, mereka yang berdomisili di distrik ini berjumlah 12.854 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Koya Barat, yaitu 5044 jiwa, sedangkan paling sedikit menempati Koya Tengah, 427 jiwa.

Sebelum menjadi distrik sendiri, Muara Tami dulunya masuk ke dalam wilayah Distrik (dulunya disebut kecamatan) Abepura, Kota Jayapura. Setelah terjadi pemekaran kecamatan, Muara Tami kemudian mengalami peningkatan status menjadi kecamatan persiapan (KANPERCAM). Muara Tami didefinisikan menjadi kecamatan sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1996, yang ditandai dengan peresmian Gubernur Irian Jaya, 27 Februari 1997. Pada 2002, nomenklatur kecamatan diubah menjadi distrik sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Nomor 21 tahun 2001.

Sebelum seperti sekarang ini, Muara Tami pada masa Orde Baru termasuk daerah transmigran. Saluran transmigran dibuka pada 1983 di Koya Barat dan Koya Timur, yang merupakan daerah agraris. Para migran didatangkan dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, untuk menempati dua wilayah itu. Koya Barat dan Koya Timur juga menjadi kelurahan pertama yang diresmikan Walikota Jayapura pada 2001. Dengan demikian, kebanyakan migran di Muara Tami masuk ke dalam kategori “migran semasa hidup” (*life time migrant*), atau mereka pindah dari tempat lahir ke tempat tinggal sekarang, atau mereka yang tempat tinggalnya sekarang bukan di wilayah provinsi tempat kelahirannya (Munir, 2011).

Penempatan lokasi didasarkan pada budaya dan tradisi para migran. Orang Jawa,

yang dianggap punya pengetahuan lokal yang lebih baik dalam hal mengelola tanah (berkebun dan berladang), ditempatkan di Koya Barat dan Koya Timur, yang memiliki kontur tanah relatif baik untuk membuka lahan pertanian. Lambat laun, karena perkembangan zaman, ada juga suku Batak, Ambon, Bugis, dan OAP, tinggal di daerah ini.

Meski begitu, orang Jawa tetap mendominasi dua kelurahan ini. Kampung Skow Sae di daerah pantai, juga menjadi daerah transmigran. Kampung ini dihuni orang Bugis, Makassar, dan Buton, tetapi yang paling banyak Bugis-Makassar. Daerah transmigran lain, adalah Kampung Haltekam. Penduduk di kampung ini kebanyakan Bugis-Makassar. Sementara empat kampung lainnya; Koya Tengah, Skow Mabo, Skow Yambe, dan Mosso, lebih banyak dihuni penduduk asli Jayapura (fort numbey), dan pendatang Papua dan Papua Barat, antara lain, Wamena, Pegunungan Bintang, Puncak Jayawijaya, Biak Numfor, Nusa Tenggara Timur, dan Sorong

Belakangan, pendatang non Papua pasca program transmigran menetap pula di Muara Tami. Mereka membeli tanah untuk ditinggali. Mereka membeli tanah atau rumah OAP yang sebelumnya berdomisili di sini. OAP pindah ke tempat lain, karena merasa tidak cocok dengan lokasi tersebut. Pola hidup sebagian OAP ini mirip Orang Sakai, yang ditulis Parsudi Suparlan, "Orang Sakai di Riau; Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia (1995)." Orang Sakai, kata Suparlan, tidak betah menempati pemukiman baru yang disediakan pemerintah. Maksud pendirian pemukiman baru itu adalah untuk memberdayakan orang Sakai, yang menurut "kacamata" pemerintah, sebagai masyarakat terasing. Kegagalan program pemukiman disebabkan, pemerintah menggunakan sistem *top down*, tanpa memahami terlebih dahulu sosial budaya, ekonomi, politik, dan administratif orang Sakai (Suparlan, 1995).

Sebagai daerah perbatasan negara, infrastruktur di Distrik Muara Tami sejak era pemerintahan Joko Widodo periode pertama (bersama Jusuf Kalla), perlahan-lahan mulai dibenahi, terutama jalanan. Dalam pandangan antropologi, infrastruktur diterima baik oleh masyarakat, disebabkan menjanjikan pengharapan lebih baik. Harapannya,

masyarakat akan sejahtera dan terkena imbas dari akses-akses jalan yang dibangun (Kadir, 2018).

Dari delapan kelurahan/kampung, Kampung Mosso paling terpencil. Ia terletak di batas negara Indonesia - PNG. Hanya di wilayah ini berdiri kantor TNI Angkatan Darat (AD), dan pos penjagaan TNI AD, yang petugasnya terlihat berjaga-jaga dan memeriksa setiap ada orang luar lalu-lalang ke wilayah tersebut. Kehadiran pos penjagaan TNI AD dan TNI AL di wilayah perbatasan disebabkan, selain menjaga kawasan ini dari gangguan gerakan yang sewaktu-waktu bisa mengancam keamanan nasional, juga untuk meredam peredaran narkoba jenis ganja, yang masuk melalui jalur darat dan laut.

Masyarakat Muara Tami heterogen dari segi etnis dan agama. Adanya orang OAP, Bugis, Makassar, Buton, Toraja, Ambon, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya, mencerminkan kemajemukan suku di Muara Tami. Keragaman suku ini berkaitan dengan agama yang dianut penduduk. Orang Jawa, Bugis, Makassar, dan Buton, misalnya, merepresentasikan Islam. Sementara OAP, Toraja, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur, identik dengan non muslim. Malah, ada juga penganut kepercayaan (agama lokal) sebanyak 130 orang. Mereka adalah OAP, yang menganut agama leluhur.

Pemeluk di Muara Tami kebanyakan memeluk Islam, yaitu 10.141 jiwa. Setelah itu, berturut-turut Kristen (6373 jiwa), Katolik (1135 jiwa), Hindu (15 jiwa), dan Penganut Kepercayaan (130 jiwa) (Muara Tami 2017). Pemeluk Islam paling banyak di Muara Tami, yaitu 10.141 jiwa, dan terbanyak di Kelurahan Koya Barat (4948 jiwa) dan Koya Timur (3829 jiwa). Penduduk di kelurahan ini umumnya non Papua, yaitu campuran antara migran dan bukan migran.

Sementara itu, umat Kristen terhitung paling banyak menetap di Kelurahan Koya Barat, yaitu 1842 jiwa. Dibanding kelurahan/kampung lain, Kampung Koya Tengah menjadi pusat pemeluk Katolik, atau terbanyak di Muara Tami, yaitu 737 jiwa. Sementara, rumah ibadat Gereja (Protestan) terhitung paling banyak, yaitu 45 unit, masjid, 10 unit, Gereja Katolik, 4 unit, dan Kopel, 1 unit (BPS Kota Jayapura, 2017).

Dinamika Kebangsaan Masyarakat Muara Tami Nasionalisme Masyarakat Perbatasan

“Kami sudah tenang hidup begini. Tidak perlu lagi bikin macam-macam. Bikin susah-susah saja. Apalagi sampai mau pindah warga negara.” (Markus (45), warga Skow Mabo).

Pernyataan Markus, warga Skow Mabo, merepresentasikan tanggapan sebagian besar masyarakat di perbatasan Indonesia – PNG, yang mengaku bangga menjadi WNI. Perasaan nasionalisme itu mereka tunjukkan dengan berbagai cara, antara lain, memasang bendera merah putih di halaman rumah setiap kali menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan menghafal lagu Garuda Pancasila. Lagu-lagu tersebut mereka hafal saat duduk di bangku sekolah, dan sampai sekarang masing-masing mengingatnya. Apalagi, mereka masih menyanyikan lagu Indonesia Raya saat upacara 17 Agustus yang diadakan Kantor Distrik Muara Tami.

Beberapa penduduk OAP yang saya jumpai di perbatasan sering kali berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan sesama mereka. Selain bahasa lokal, mereka juga berbincang-bincang pakai bahasa Indonesia. Hal ini diperkuat pula dengan instruksi pemerintah setempat yang menganjurkan penggunaan bahasa Indonesia. Sebelum memasuki gerbang Distrik Muara Tami, ada satu *plang* besar di pinggir jalan, yang tulisannya berisi anjuran menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira imbauan dari isi pesan tersebut adalah, tetap melestarikan warisan budaya leluhur (salah satunya, bahasa lokal), tetapi tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa (salah satunya, berbahasa Indonesia).

Ketika melihat seorang anak perempuan berusia SD, saya mencoba mengajaknya mengobrol menggunakan bahasa Indonesia. Saya menanyakan pertanyaan dasar, seperti siapa namanya, di mana bersekolah, dan siapa nama Presiden Indonesia. Pertanyaan saya ini dijawab lancar dan benar. Anak yang mengaku kelas empat SD ini juga tahu, Jakarta adalah nama ibukota negara, dan terletak di Pulau Jawa. Ini menunjukkan, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan anak-anak di perbatasan-PNG, tergolong bagus. Pengetahuan terkait wawasan

kebangsaan diperoleh melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Selain itu, guru juga sering meminta murid-murid untuk menghafal di depan kelas lagu-lagu bertema kebangsaan. Namun, ada juga warga yang mengaku lupa secara keseluruhan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hafal atau tidaknya seseorang lagu kebangsaan tidak berkaitan dengan nasionalisme. Jangan menjadikan hafalan sebagai rujukan utama, bahwa orang itu berjiwa nasionalisme.

Kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Skow di perbatasan Indonesia-PNG, membuat masyarakat Indonesia yang bermukim di perbatasan, merasa semakin bangga. Dibanding tapal batas yang dimiliki PNG, konstruksi bangunan gedung pos tapal batas Indonesia ini terlihat megah dan mentereng. Pos PLBN Terpadu Skow ini diresmikan Presiden Indonesia, Joko Widodo, 9 Mei 2017.

Gerbang perbatasan atau tapal batas negara adalah beranda depan negara di perbatasan. Gerbang inilah yang pertama kali dilihat oleh warga negara lain bila memasuki negara Indonesia. Kemegahan tapal batas negara Indonesia, juga semacam pencitraan, bahwa negara Indonesia lebih sejahtera dan lebih maju dibanding negara “sebelah”. Berkat kemegahan tapal batas negara, bukan hanya masyarakat perbatasan dan wisatawan domestik yang bangga berfoto-foto di sana, tetapi juga orang-orang PNG. Beberapa orang PNG yang kebetulan melintas ke wilayah Indonesia, sering kali berfoto-foto di tempat yang dianggap menarik.

Identitas jati diri Indonesia ikut dipertaruhkan di gerbang perbatasan. Apalagi, lalu lintas dan interaksi orang Indonesia dengan orang PNG, terlihat intens di tapal batas Indonesia. Pada hari-hari biasa, atau “hari pasar”, orang-orang PNG selalu terlihat membeli kebutuhan sembako, atau sekadar jalan-jalan di Pasar Wutung di tapal batas negara. Bagi orang PNG, harga barang-barang dan makanan di Indonesia dianggap murah. Karena itu, hampir setiap hari kita melihat ada orang PNG yang memasuki wilayah Indonesia di perbatasan untuk belanja bahan material bangunan, makanan, rokok, dan mencetak sablon baju. Transaksi ekonomi di daerah perbatasan bagi orang PNG, juga dianggap

mudah. Sebab, nilai tukar 1 Kina (mata uang PNG) adalah sekitar Rp. 4000. Pun, para pedagang Indonesia menerima pembayaran dalam bentuk Kina. Nantinya, uang Kina ini ditukarkan kembali di tempat penukaran *money changer*, di pintu masuk gerbang Indonesia-PNG di bagian dalam.

Nasionalisme masyarakat perbatasan ditunjukkan pula dengan perasaan bangga menggunakan barang-barang produk Indonesia daripada PNG. Bagi orang Indonesia yang pernah ke PNG, tidak ada “oleh-oleh” istimewa di PNG. Kalau ke sana, yang kerap jadi bahan cerita adalah sosis daging domba dan kain. Itu pun kain buatan Australia. Secara geografis, PNG cukup dekat dengan Australia. Begitu pula, negara Indonesia lebih aman dibandingkan PNG. Seperti dilansir *tribunnews.com*, 23 Januari 2018, Kota Port Moresby di PNG dianggap kota paling tidak aman di dunia, dan dijuluki kota paling berbahaya di dunia. *Tribun* mencatat, tindakan kejahatan pencurian, pemerkosaan, begal, hingga pembunuhan, adalah sesuatu yang dianggap wajar di Port Moresby. Kejahatan di kendaraan umum hampir terjadi setiap hari. Banyak gangster bersenjata berkeliaran di mana-mana (*Tribunnews.Com* 2018, diakses 25 Juli 2019).

Citra Indonesia juga dijaga baik-baik oleh petugas imigrasi dan TNI yang menjaga PLBN. Pelayanan di Kantor Migrasi juga tampak baik. Beberapa orang PNG yang masuk ke wilayah Indonesia, dan orang Indonesia yang pernah memasuki PNG, menyatakan, pelayanan yang mereka terima dari petugas imigrasi cukup baik. Dengan ramah, petugas imigrasi melayani orang-orang yang ingin melintasi batas negara maupun wisatawan domestik, yang hanya datang untuk sekadar foto-foto. TNI AD yang bertugas di pos penjagaan pintu masuk melayani juga dengan ramah, meski tetap bersikap tegas menjalankan tugas-tugasnya. Contohnya, meminta kaca mobil diturunkan serta menyimpan KTP setiap pengunjung bila ingin masuk ke PLBN.

Dengan demikian, nasionalisme masyarakat perbatasan Muara Tami dapat dipahami melalui tindakan individual maupun tindakan kolektif. Tindakan individual adalah berupa penghormatan terhadap simbol-simbol ke-Indonesia-an, seperti bendera Merah Putih,

menghafal lagu kebangsaan Indonesia, berbahasa Indonesia, dan menggunakan produk dalam negeri. Sementara tindakan kolektif dapat dimaknai dengan: (1) menjaga hubungan baik secara timbal-balik dengan orang-orang PNG yang berkunjung ke Indonesia, dan ketika mereka ke PNG; (2) menjadi tuan rumah yang baik terhadap para pengunjung/turis Indonesia dan PNG yang mengunjungi wilayah perbatasan; (3) menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung di tapal batas negara. Pada hakikatnya, inti dari pemahaman nasionalisme masyarakat perbatasan adalah menjaga nama baik Indonesia, serta tidak membuat malu nama Indonesia.

Meski begitu, nasionalisme di daerah perbatasan dapat juga dipahami sebagai hasil konstruksi, seperti dikatakan Gellner (1997), dalam tulisan (Akbar, 2019, p. 96), yang menyebutkan, nasionalisme sejak awal bukanlah entitas yang terlahir bersamaan dengan kelahiran di dunia. Ia sesuatu yang (di)hadir(kan), bukan sesuatu yang lahir. Karena itu, nasionalisme bisa teramat cair, lentur, serta sewaktu-waktu bisa muncul dan hilang begitu saja. Sama seperti pada sebagian OAP. Pada hari ini, misalnya, mereka tampak begitu berjiwa nasionalis, tetapi di lain waktu, mereka pun bisa meneriakkan kata-kata “M”.

Relasi Masyarakat Perbatasan Indonesia – Papua Nugini

Hampir semua OAP di Muara Tami punya hubungan emosional dengan orang-orang PNG. Sejumlah informan menyatakan, orang di Mosso memiliki paling banyak keluarga dan kerabat di PNG ketimbang orang di kampung lain. Meskipun begitu, dalam hal kewarganegaraan, mereka tetap memilih Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk menunjukkan relasi tersebut, orang Mosso dan PNG dalam sepekan membagi waktu tinggal di Mosso dan PNG. Misalkan, setiap Senin hingga Kamis beraktivitas di Mosso, sedangkan Jumat sampai Minggu, bermalam di PNG.

Pemerintah Indonesia memberikan keistimewaan kepada semua orang di Muara Tami untuk melintasi wilayah PNG. Syaratnya, mereka mengantongi Kartu Lintas Batas (KLB) yang diterbitkan masing-masing negara. Untuk KLB Indonesia dikenal ‘kartu

merah”, karena berwarna merah, sedangkan KLB PNG berwarna kuning. Sebaliknya, bagi yang tidak punya KTP Muara Tami, dan hendak melintas ke PNG, mereka diharuskan mengantongi paspor. KLB hanya dipakai untuk melintas saja, dan tidak dibolehkan untuk bermalam (Wawancara Gustiany, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Distrik Muara Tami, Jayapura, Juli 2019).

Penduduk di perbatasan, seperti tertuang dalam Buletin Badan Pengelola Perbatasan Kota Jayapura 2015, adalah seseorang yang karena kelahiran/perkawinan memiliki hak tempat tinggal, hak tradisional, dan kebiasaan dalam daerah perbatasan yang telah ditentukan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi mereka yang mendapatkan hak penggunaan tanah, atau hal lain, yang dianggap tradisional berdasarkan UU Nasional atau melalui proses yang bersifat nasional.

Dari hasil amatan di tapal batas negara, Pasar Wutung dan warung-warung di PLBN selalu ramai oleh kedatangan orang PNG, apalagi bertepatan “hari pasar” di wilayah Indonesia. Dalam sepekan, hanya ada dua hari pasar, yaitu Selasa dan Kamis. Pada momen ini, orang PNG hanya melakukan transaksi ekonomi di wilayah perbatasan, dan tidak sampai ke kota. Transaksi dilakukan menggunakan uang Kina. Bagi orang PNG, harga barang-barang yang dijual di Indonesia dianggap murah dibanding di negaranya. Sebaliknya, tidak terlalu banyak orang Indonesia yang melintasi PNG, apalagi cuma untuk kepentingan berbelanja. Orang Indonesia yang ke PNG umumnya menjenguk keluarga dan kerabat, serta beribadah (umat Katolik).

Orang Indonesia yang paling banyak berkunjung ke PNG adalah orang Mosso, yang secara kultural memang mirip PNG. Wilayah perbatasan juga terletak di Mosso. Dalam percakapan sehari-hari, orang Mosso menggunakan tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Mosso, dan bahasa *Pidjin* (bahasa Inggris PNG). Biasanya, orang Indonesia yang belanja ke PNG membeli kain dan baju buatan Australia, dan atau membeli sosis berdaging domba.

Dinamika Kebangsaan

Tulisan ini menemukan, terdapat dua penyebab dinamika kebangsaan di Muara

Tami, yaitu masih adanya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kesenjangan ekonomi antara OAP dan pendatang.

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Narasi terbentuknya OPM adalah tentang masa silam, di mana mereka menolak masuk ke dalam wilayah NKRI. Secara historis, sekitar 1963 dan 1964, yaitu pada masa-masa Irian Jaya berintegrasi dengan Indonesia, organisasi semacam ini mulai hadir. Dua organisasi gerakan yang terkenal adalah “Gerakan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” di Jayapura dan “Organisasi dan Perjuangan Menuju Kemerdekaan Papua Barat” di Manokwari, yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Irian Jaya terlepas dari Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, pihak keamanan dan kejaksaan kemudian menyebut segala bentuk organisasi yang resistan dan merongrong pemerintahan sah sebagai “Organisasi Papua Merdeka” atau, yang dikenal dengan sebutan OPM. Pada awalnya OPM terdiri atas dua faksi utama, yaitu organisasi atau faksi yang didirikan oleh Aser Demotekey, mantan Kepala Distrik Demta Kabupaten Jayapura. Gerakan ini mulai muncul di permukaan pada 1970 setelah Penentuan Pemilihan Rakyat (Pepera) selesai. Sebutan OPM pertama kali muncul di Manokwari pada 1964, dan kemudian makin populer saat terjadi pemberontakan senjata yang dipimpin Permenas Ferry Awom pada 1965 di Manokwari, serta berbagai pemberontakan lainnya di berbagai wilayah di Irian Jaya (Andrianto, 2001).

Pasca reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) memulai mengubah perspektif orang Papua terhadap pemerintah. Untuk mendekati orang Papua, Gusdur melakukan pendekatan kultural, yang diawali pada 2000. Dalam banyak catatan media, Gusdur adalah presiden pertama yang mengakui keidentitasan Papua. Gusdur juga merupakan presiden pertama yang tidak melarang bendera Bintang Kejora dikibarkan di Tanah Papua. Bagi Gusdur, Bintang Kejora dianggap bendera kultural semacam umbul-umbul, dan bukan bendera politik, sehingga tak perlu dirisaukan. Gusdur pula yang mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua,

serta ikut mendukung masyarakat Papua menggelar Kongres Nasional Rakyat Papua (Syuhudi, 2018).

Kampung Mosso dulunya disebut-sebut tempat strategis buat persembunyian Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kuat dugaan, kondisi alam di Mosso yang ditumbuhi pepohonan lebat, dan posisinya berada di tapal batas negara, membuat orang-orang OPM bisa masuk dan keluar Indonesia - PNG, tanpa diketahui. OPM sendiri, meskipun gaungnya kini jarang lagi terdengar, tetapi kehadiran organisasi yang menginginkan Papua berpisah dari NKRI ini, tetap saja membuat masyarakat di sekitar perbatasan diliputi kekhawatiran. Apalagi, setiap kali ada demonstrasi, baik dilakukan masyarakat maupun mahasiswa, kerap dihubungkan dengan gerakan OPM. Jadi, bukan hanya non Papua yang merasakan trauma kolektif masa silam ini, melainkan juga OAP sendiri.

Seorang informan di tapal batas negara, Haji Salam (samaran), orang Bugis, mengaku pernah melihat langsung pertempuran antara OPM dengan TNI sekitar 1980-an, di Kampung Mosso. Berkali-kali, ia pun mendengar suara tembakan senjata, yang dilancarkan kedua belah pihak. Namun, sejauh ini, sejak belasan tahun bermukim di wilayah perbatasan sebagai wiraswasta, ia dan keluarga tidak pernah diganggu oleh OPM. *“Mereka (OPM) sepertinya hanya menyerang aparat keamanan, bukan warga sipil,”* kata Haji Salam, yang ditemui di warungnya.

Gusniaty, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Distrik Muara Tami, mengemukakan, ia beberapa kali mendengar cerita warga tempatan, bahwa OPM pernah membunuh penebang kayu asal Bugis pada 1980-an. Namun, dugaan saya, kejadian ini dapat dilihat sebagai berikut: kehadiran orang Bugis yang melakukan penebangan pohon dianggap ingin “mencuri” sumber daya alam milik Papua. Dalam diri orang Bugis terdapat dua identitas, yaitu pendatang dan orang Indonesia. Sementara itu, orang OPM menganggap, merekalah pemilik sah tanah Papua, dan mereka bukan bagian dari Indonesia. Sehingga, ketika orang Bugis, atau etnis non Papua lainnya menebang pohon (meskipun legal) di wilayah mereka, OPM menganggap sebagai suatu tindakan pencurian.

Di Jayapura, gerakan OPM terlihat cukup masif antara 1980 hingga 1990-an. Suasana Kota Jayapura saat itu dikatakan mencekam. Penyebabnya, bukan hanya OPM, tetapi juga peperangan yang melibatkan antarsuku terjadi di tempat terbuka (jalan raya). Beberapa warga non Papua bahkan mengetahui tanda-tanda akan terjadi peperangan, seperti bunyi suitan panjang (Wawancara sejumlah informan di Jayapura, Juli 2019).

Lain lagi cerita Lamtumiari Tampubolan, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Jayapura. Katanya, ada seorang laki-laki, guru agama ASN di bawah naungan kemenag, diketahui terlibat dalam gerakan OPM pada 2016. Banyak rekannya sesama guru, dan juga ASN di kalangan KEMENAG, terkejut mendengarnya. Padahal, kata Lamtumiari, guru ini orangnya baik, pendiam, dan sopan. Ketika banyak yang mengetahui sepak terjangnya di dalam OPM, pihak KEMENAG sempat beberapa kali menasihati, dan memintanya keluar dari OPM, dan aktif kembali mengajar. Lamtumiari, Kepala KEMENAG Jayapura, dan Kapolres Jayapura, malah pernah mendatangi kediaman guru bersangkutan untuk meminta berhenti dari OPM. Selama aktif di OPM, guru ini tak pernah lagi mengajar selama beberapa bulan, sehingga gaji dan tunjangan terpaksa dihentikan. Sayangnya, semua saran dan bujukan tidak digubris. Ia tetap bersikeras di OPM. Pada akhirnya, guru ini tertembak mati dalam sebuah pertempuran OPM melawan aparat keamanan Indonesia, dan ia ikut terlibat di dalam pertempuran itu.

Cerita-cerita tentang OPM di Jayapura, selalu saja mendatangkan hal menarik. Di satu sisi, banyak kalangan menganggap, gerakan ini tidak ada lagi di Jayapura. Mereka semua bertobat, dan mengakui Papua bagian integral Indonesia. Sejumlah informan yang saya temui di Jayapura dan di wilayah perbatasan Indonesia - PNG, juga menyatakan, walaupun masih ada tokoh-tokoh OPM yang belum mengakui Indonesia, mereka biasanya tidak menetap di Indonesia.

Memang, teriakan-teriakan “M” atau merdeka dari OAP, masih sering terdengar. Terutama, bila merasakan ketidakadilan dan dirugikan terkait pendidikan dan pelayanan

publik. Namun, teriakan “M” ini, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keinginan mereka untuk merdeka. Teriakan “M” itu dimaknai semacam, istilah kasarnya, makian, sebagai bentuk luapan kekecewaan atas apa yang ia alami.

Sementara itu, di sisi lain, meskipun gerakan OPM secara vulgar dianggap tidak ada, ideologi mereka tampak masih terpelihara. Informan saya menyatakan, ideologi tentang Papua Merdeka mungkin sudah mati di kalangan generasi tua, tetapi masih bertumbuh di kalangan anak muda Papua, utamanya mahasiswa asal pegunungan Papua (Orang Gunung). Di lingkungan tempat tinggal informan saya di Distrik Abepura, ia acap kali mendengar mahasiswa yang tinggal di asrama mahasiswa menyanyikan lagu-lagu Papua Merdeka. Mahasiswa ini umumnya aktivis Organisasi Daerah. Pada hari berbeda, saya juga pernah melihat beberapa anak muda OAP menelusuri jalan raya, dan salah satu dari mereka, memakai *noken* (tas khas Papua, tapi yang berbahan wol), berlambang Bintang Kejora (bendera OPM). Rupanya, penggunaan simbol-simbol (bendera Bintang Kejora) di muka umum, menjadi pemandangan biasa, dan sebagian kalangan tidak mengaitkan lagi dengan OPM.

OPM di Jayapura sebenarnya sudah padam dalam bentuk gerakan terbuka (manifes). Penggunaan simbol-simbol seperti Bintang Kejora dan nyanyian Papua Merdeka, adalah bagian dari kebanggaan atas identitas ke-Papua-an mereka. Hal ini sama seperti kebanggaan etnis tertentu, yang ditunjukkan dengan menyanyikan lagu-lagu khas daerah mereka. Meski begitu, informan saya mengingatkan, bahwa benih-benih OPM masih tertanam di anak-anak muda Papua. Ada semacam perasaan bangga sebagian anak-anak muda dengan kisah-kisah perjuangan “orang tua” kepada Belanda dan Indonesia. Jumlah pendukung Papua Merdeka mungkin sudah berkurang, tetapi menjadi lebih berkualitas. Mereka juga tak lagi mengajak untuk perang terbuka, melainkan mengubah strategi dengan cara menanamkan doktrin kepada anak-anak muda terpelajar Papua, seperti mahasiswa dan dosen. Jadi, ingatan tentang OPM menjadi semacam ingatan sosial bagi kalangan anak-anak muda sekarang. Sebagai bagian dari kisah

sejarah sosial mereka, cerita-cerita ini tidak mungkin bisa dihilangkan begitu saja.

Kesenjangan Ekonomi

Apabila mengacu kepada pembangunan fisik (infrastruktur) di daerah perbatasan, pemerintah sejauh ini dianggap sudah memerhatikan kebutuhan masyarakat perbatasan. Artinya, masyarakat perbatasan sudah merasakan jalanan beraspal mulus, penyediaan air bersih, pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan, meski di antara pelayanan itu, terutama pendidikan dan kesehatan, diakui belum merata dirasakan semua orang. Orang Mosso, misalnya. Karena terletak paling jauh, orang-orang Mosso kerap kali mengeluhkan sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka berharap, pemerintah membangun sekolah di sekitar lokasi tempat tinggal mereka.

Masyarakat pra-sejahtera umumnya menempati tapal batas negara, seperti Kampung Mosso. Bila melihat kondisi rumah OAP di perbatasan, mereka umumnya tinggal di rumah tanpa lantai, serta berdinding seng atau papan tua. Mereka kebanyakan bekerja di sektor informal, dan kerja serabutan (tidak tetap).

Masih adanya kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan, sering kali dikaitkan Problematika nasionalisme, terutama OAP. Memang, kondisi ekonomi masyarakat perbatasan secara umum dapat dikatakan baik. Namun, kondisi itu hanya tampak pada migran non Papua. Jika membandingkan kondisi perekonomian migran non Papua dengan OAP, jelas sekali terlihat ada kesenjangan. Secara status, migran non Papua rata-rata menengah atas dan memiliki pekerjaan tetap, sedangkan OAP sebaliknya, menengah bawah (hidup pra-sejahtera). Kondisi kehidupan seperti ini yang kemudian menyebabkan mereka menyalahkan pemerintah, yang menurut sejumlah informan, pemerintah melakukan “tebang pilih”, sehingga dianggap belum berbuat adil buat mereka.

Untuk mengamati perekonomian masyarakat perbatasan Indonesia, tulisan ini akan melihatnya secara terpisah, dan membandingkan antara kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan Indonesia dengan orang PNG, dan kehidupan ekonomi migran non Papua dengan OAP. Untuk pertanyaan

pertama, kehidupan ekonomi orang Indonesia yang bermukim di perbatasan tampak lebih bagus dibanding orang PNG. Hal ini diperkuat dengan pengakuan beberapa penduduk (migran non Papua dan OAP), yang menolak pindah kewarganegaraan PNG. Saat ditanyakan alasan penolakannya, mereka kompak menjawab, "Lebih enak tinggal di Indonesia. Jalan-jalan dan gedung-gedung di Indonesia lebih bagus-bagus dan lebih maju. Kehidupan masyarakat kita juga lebih sejahtera."

Richard Awe, warga di Skow Yambe, menuturkan, ia punya banyak kerabat di Papua Nugini. Dalam sebulan, mereka pasti saling mengunjungi. Kalau bukan ia dan keluarganya ke Papua Nugini, maka keluarga mereka di Papua Nugini yang mendatangi rumahnya. Bahkan, kata Richard Awe, beberapa kerabatnya yang sebelumnya warga negara Indonesia, beralih menjadi warga negara Papua Nugini.

"Waktu selesai kuliah di Fakultas Hukum Uncen (Universitas Cendrawasih Jayapura), ia jalan-jalan mengunjungi keluarga di PNG (Papua Nugini). Rupanya, ia tertarik masuk politik. Sekarang ini, ia menjadi anggota dewan di PNG. Sedangkan ada juga keluarga lain pindah warga negara karena menikah dengan orang PNG," kata Richard.

Dalam kasus kerabat Richard di atas, kita dapat memilah menjadi dua bagian. Untuk kasus pertama (menjadi anggota dewan), ia melihat peluangnya untuk menjadi anggota dewan di Papua Nugini cukup besar ketimbang di Indonesia. Artinya, dari segi pendidikan dan intelektual, kerabat Richard dapat dikatakan lebih unggul dari orang Papua Nugini. Dan, ini juga dikatakan Richard, yang didasarkan pada pengalamannya berinteraksi dengan orang Papua Nugini, bahwa pendidikan orang Indonesia diakui tampak lebih maju dibanding orang Papua Nugini. Jadi, masalah pindah warga negara dalam kasus ini adalah adanya peluang atau kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, serta kurangnya kompetitor di dunia kerja. Sayangnya, Richard tidak menyebutkan berapa gaji kerabatnya yang menjadi anggota dewan di Papua Nugini itu, sehingga tidak bisa dijadikan perbandingan dengan anggota legislatif di Indonesia.

Kasus kedua, kerabat perempuan Richard memilih menjadi warga negara Papua Nugini, karena faktor pernikahan. Ia menikah dengan orang Papua Nugini, dan akhirnya mengikuti kewarganegaraan suami. Perpindahan kewarganegaraan ini terkait masa depan pendidikan anak-anak mereka kelak. Dengan hanya mengantongi satu identitas, itu akan memudahkan mereka untuk mengurus administrasi kependudukan (misalnya, kartu keluarga, KTP). Namun, pernikahan antara orang Indonesia dengan Papua Nugini termasuk jarang terjadi. Kalau pun ada, mereka melangsungkan pernikahan dengan kerabat (endogami), dan tujuannya adalah untuk mempererat kembali jalinan tali kekerabatan, yang dipandang nyaris terputus. Secara geografis dan historis, orang Mosso memiliki kerabat orang PNG. Tak heran, mereka berkomunikasi menggunakan tiga bahasa; bahasa Indonesia, bahasa Mosso, dan bahasa *Pidjin*.

Sementara untuk pertanyaan kedua, migran non Papua secara ekonomi hidup lebih sejahtera dibanding OAP. Sepintas, kesenjangan ekonomi ini terkesan tidak menimbulkan persoalan di permukaan. Namun, kesenjangan ini rupanya menimbulkan kecemburuan sebagian OAP. Di kemudian hari, ini bisa saja menjadi masalah (Wawancara beberapa informan OAP dan non Papua di Jayapura dan Muara Tami, Juli 2019). Untuk konteks Jayapura, dan terkhusus lagi masyarakat perbatasan, problem nasionalisme tak bisa dilepaskan dari kesenjangan ekonomi.

Selama ini, negara hanya dipandang mementingkan menanamkan perasaan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan melalui kegiatan-kegiatan formalistis, tetapi disisi lain, kurang peka melihat kebutuhan mendasar masyarakatnya. Tak heran, sebagian OAP kurang memberi respek ketika pemerintah melaksanakan suatu penyuluhan atau sosialisasi, yang dianggap sebagai sesuatu hal percuma. Sebab, banyak yang tidak percaya. Kata mereka, "Ah.. Ko mau tipu-tipu lagi.!" Mereka lebih tersentuh apabila pemerintah membicarakan masalah yang terkait "perut" (perubahan ekonomi) ketimbang ceramah-ceramah, yang kadang tidak dimengerti oleh mereka.

Akhirnya, dalam kasus Muara Tami, nasionalisme menjadi kurang bermakna ketika masih terdapat “lubang besar” antara cita-cita kemerdekaan dengan realitas. Yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya menanamkan nasionalisme dalam jiwa mereka, melainkan juga pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan. Setidaknya, pemeliharaan rasa kebangsaan dan peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan harus dibarengi dengan upaya untuk menyejahterakan masyarakat (Pamungkas, 2015). Apalagi, sejumlah konflik yang lahir di tanah Papua, disebabkan oleh pandangan OAP mengenai marginalisasi ekonomi.

Selain masalah ekonomi, akses pendidikan dan akses beribadah yang belum dirasakan oleh seluruh masyarakat di perbatasan, juga menjadi catatan penting pemerintah. Misalkan, orang di Kampung Mosso masih kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan dan beribadah, seperti halnya warga di kampung lain. Bahkan, karena letak rumah ibadat mereka cukup jauh dari tempat tinggalnya, umat Katolik di Mosso selalu menyeberang ke PNG untuk melaksanakan Ibadah Misa. Meski dalam pandangan negara persoalan akses layanan pendidikan dan beribadah tidak berkorelasi langsung dengan nasionalisme. Namun, bagi OAP, memenuhi dan memudahkan akses pelayanan adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap mereka. Setidaknya, jika persoalan ini tidak terpenuhi, bisa-bisa akan memicu stigma negatif masyarakat perbatasan terhadap pemerintah.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, disimpulkan bahwa, infrastruktur wilayah Distrik Muara Tami, Jayapura, yang menjadi “pintu gerbang” halaman depan Indonesia dengan Negara Papua Nugini (PNG), tergolong bagus. Jalan raya beraspal mulus. begitu pula, jalanan menuju rumah-rumah penduduk, juga beraspal beton. Singkatnya, akses menuju ke Pos Tapal Batas Negara (PTBN) cukup mudah dijangkau menggunakan kendaraan darat (mobil dan motor). Kondisi gerbang di perbatasan Indonesia-PNG, juga terlihat lebih baik daripada gerbang milik PNG. Hal ini

menjadikan orang Indonesia yang berkunjung ke tapal batas negara, merasa bangga menjadi WNI, sekaligus menunjukkan, negara Indonesia lebih makmur ketimbang PNG. Akses layanan air bersih, listrik, pendidikan, beribadah, dan kesehatan, juga cukup bagus. Sayangnya, belum semua penduduk mendapatkan akses layanan mudah, utamanya warga di Kampung Mosso, yang wilayahnya merupakan perbatasan langsung dengan PNG. Keluhan warga di Mosso masih sama seperti dulu, yakni sekolah dan rumah ibadat yang jauh. Akibatnya, umat Katolik di Mosso selalu beribadat di PNG daripada di Indonesia.

Secara umum, paham kebangsaan masyarakat perbatasan Muara Tami terlihat cukup bagus. Mereka umumnya berjiwa nasionalis, dan mencintai NKRI. Hal ini diperkuat pula dengan peran lembaga-lembaga negara, seperti Kantor Distrik Muara Tami, Kementerian Pariwisata, TNI, dan aktivitas individual, yang terus berupaya menanamkan nasionalisme kepada masyarakat perbatasan. Meski begitu, nasionalisme pada masyarakat perbatasan terkadang masih menemui gangguan, seperti belum hilangnya ingatan sosial OAP tentang perjuangan OPM, yang bagi mereka OPM dipandang “heroik”, serta masih dirasakannya kesenjangan ekonomi antara OAP dengan non Papua. Selain itu, sebagian OAP masih sering mengaitkan nasionalisme dengan kesejahteraan mereka. Nasionalisme bagi sebagian masyarakat OAP di perbatasan tidak hanya dalam bentuk aktivitas formalistis, seperti penghormatan terhadap simbol-simbol negara, menghafal lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Tetapi, yang paling urgen, nasionalisme berkaitan erat dengan kesejahteraan mereka. Bila kesejahteraan ekonomi belum terwujud, itu berarti nasionalisme belum nyata dan hanyalah “sesuatu” yang dibayangkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balai Litbang Agama Makassar yang melibatkan penulis untuk ikut melakukan penelitian ini pada 2019. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Redaksi Jurnal Al-Qalam, yang bersedia memuat tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R. 2019. Imaji Identitas Nasional di Ruang Diaspora Anggota PPI di Thailand. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v40i1.12044>
- Andrianto, T. T. 2001. *Mengapa Papua Bergolak?* Yogyakarta: Gama Global Media.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kota Jayapura. 2017. *Kota Jayapura dalam Angka 2017*. Jayapura: BPS Kota Jayapura.
- Endraswara, S. 2006. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Ideologi, Epistemologi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kadir, H. 2018. Ambon dalam Api dan Bara: Fragmen-Fragmen Pasca Konflik.
- Kasniyah, N. 2012. *Naniek. 2012. Tahapan Menentukan Informan dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak.
- Mambraku, N. S. 2015. Penyelesaian Konflik di Tanah Papua dalam Perspektif Politik. *Kajian*, 20(2), 75–85.
- Meteray, B. 2012. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Meteray, B. 2014. Kontestasi Nasionalisme Papua dan Nasionalisme Indonesia Sebelum dan Sesudah Orde Baru. *Seminar Akhir Tahun “Integrasi Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Sosial Politik Papua Ke Indonesia: Tinjauan Akademik” Kerjasama Tim Kajian Papua P2 Politik Dengan Jaringan Damai Papua (JDP)*, 281–286. Jakarta: LIPI.
- Muara Tami, D. 2017. *Monografi Distrik Muara Tami 2017 Kota Jayapura*. Jayapura: Distrik Muara Tami.
- Munir, R. 2011. Migrasi. In S. M. A. & O. B. Samosir (Ed.), *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Muslim, A. 2014. Dakwah Peka Kultur ala Aipon Asso: Potret Keberislaman Pegunungan Tengah Papua. *Harmoni*, 13(3), 7-21.
- Muslim, A. 2019. The Harmony Taste Of Bakar Batu Tradition On Papua Land. *Heritage Of Nusantara Volume 8 Nomor. 1 Tahun 2019*. Puslitbang Lektur Khazanah Keagamaan.
- Pamungkas, Cahyo & Triindriasara, D. 2018. Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik Identitas, Tata Kelola Pemerintahan, dan Ketahanan Orang Asli Papua. *Masyarakat & Budaya, Volume 20(Nomor 3)*, 391–406.
- Pamungkas, C. 2015. Nasionalisme Masyarakat di Perbatasan Laut: Studi Kasus Masyarakat Melayu-Karimun. *Masyarakat Indonesia*, 41(2), 147–162.
- Suparlan, P. 1995. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syuhudi, M. I. 2018. *Laporan Penelitian Integritas Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda di Kota Jayapura*. Makassar.
- Tribunnews.com. 2018. 5 Fakta tentang Port Moresby Kota Paling Berbahaya di Dunia. Retrieved from tribunnews.com website: <https://wow.tribunnews.com/2018/01/23/5-fakta-tentang-port-moresby-kota-paling-berbahaya-di-dunia-yang-letaknya-tak-jauh-dari-indonesia>
- Widjojo, M. S. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Tifa Foundation.